

Judul : Kebijakan Minim Kajian Picu Masalah Baru
Tanggal : Kamis, 16 November 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan Minim Kajian Picu Masalah Baru

JAKARTA, KOMPAS — Persoalan data yang lemah dan minimnya kajian yang melandasi sejumlah kebijakan di sektor kelautan dan perikanan berpotensi memicu bias kebijakan dan persoalan baru. Sejumlah kalangan menyerukan pembenahan tata kelola di tengah tantangan panjang masa depan.

CEO dan Founder Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar mengemukakan, perlu pembenahan data sebagai landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan gencar mengusung isu perikanan berkelanjutan dan ekonomi biru. Data yang keliru dinilai berpotensi memicu persoalan baru.

Ia menyoroti rencana kebijakan ekspor benih bening lobster yang minim kajian dan akurasi data. Keberadaan data yang solid dinilai sangat penting. Saat ini, rencana kebijakan itu juga menuai polemik di publik terkait ancaman keberlangsungan stok sumber daya benih, dan nasib pengembangan budidaya lobster di dalam negeri.

"Mengingat kebijakan (ekspor benih lobster) bisa berdampak luas secara ekologis, sosial, dan ekonomi, KKP perlu disiplin dalam menyiapkan kajian ilmiah agar nantinya (kebijakan) tidak bablas, serta mengurangi potensi masalah di kemudian hari," katanya, saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Zulficar mengingatkan, pemerintah perlu becermat pada dibukanya ekspor benih bening

lobster pada 2020 yang menyeret bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai terpidana korupsi. "Saat itu, tata kelola tak dilaksanakan dengan baik, mulai dari data dan kajian ilmiah, proses kebijakan, hingga implementasi tidak memadai. Selain itu, rawan intervensi dan konflik kepentingan," kata Zulficar, yang juga pernah menjabat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP periode 2018-2020.

Sebelumnya, data potensi benih lobster yang tidak akurat diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa. Ia mengakui data potensi benih bening lobster yang diperoleh dari tim KKP, akademisi, serta Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) berbeda-beda (*Kompas* 14/11/2023).

Menurut Trenggono, rencana melegalkan ekspor benih bening lobster antara lain untuk memetik manfaat nilai ekspor bagi peningkatan penerimaan negara bukan pajak, serta mengundang investor budidaya lobster dari Vietnam untuk budidaya di Indonesia. Diperkirakan 600 juta benih bening lobster diselundupkan ke Vietnam setiap tahun dengan nilai 1,2 miliar dollar AS per tahun.

Transfer kuota

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Suhana, secara terpisah, meng-

ungkapkan, kebijakan di sektor kelautan dan perikanan saat ini minim data dan kajian. Itu tercermin dari mudahnya kebijakan berganti-ganti dalam waktu yang singkat, seperti kebijakan buka-tutup ekspor benih bening lobster serta penangkapan ikan terukur. Pengelolaan sumber daya laut perlu perencanaan yang matang agar berkelanjutan dan basis data yang akurat agar berkeadilan.

Ia mencontohkan kebijakan penangkapan ikan terukur yang mengadopsi pendekatan *individual transfer quota* memungkinkan kuota penangkapan ikan dialihkan ke industri lain. Pola transfer kuota itu dinilai minim kajian dan belum pernah diimplementasikan di negara-negara ASEAN. Pemindahan kuota tangkapan itu dikhawatirkan mendorong komersialisasi penangkapan ikan, dan lebih berpihak kepada pengusaha,

"Kuota penangkapan ikan yang dapat dialihkan ini berpotensi memicu banyaknya calo kuota dengan berpura-pura menjadi nelayan. Tak tertutup kemungkinan kuota penangkapan ikan akan terkonsentrasi pada satu atau beberapa pemilik modal atau pengusaha perikanan," kata Suhana.

Konsep serupa pernah diterapkan dalam Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang No 27/2007. Namun, ketentuan HP3 itu akhirnya dihapuskan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. (LKT)